



Pekerja Non PNS RSUD Menderita

Tunjangan Dipangkas lewat Peraturan Gubernur

NASIB tenaga kerja di bidang kesehatan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Ruamh Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit, Jakarta Timur, masih tak tentu arah. Terbukti para pekerja tersebut masih memperjuangkan nasib mereka.

Salah satu bentuk memperjuangkan nasib mereka yakni dengan ara mendatangi para wakil rakyat di Kebon Sirih. Untuk kesekian kalinya, Fraksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menerima delegasi dari masyarakat.

Para pekerja bidang kesehatan non PNS tersebut meminta dukungan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang bekerja di sejumlah RSUD di Jakarta. Para pekerja mengklaim bahwa kedatangan mereka mewakili sekitar 2.000 tenaga kesehatan non PNS. Delegasi tersebut diterima Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah dan Anggota Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.

Menurut Abdurrahman Suhaimi, pengaduan atas permasalahan yang dialami tenaga kese-

hatan non PNS RSUD ini atas dasar adanya Peraturan Gubernur (Pergub) 176 tahun 2013. Aturan tersebut dirasakan mengurangi hak-hak mereka. "Ada beberapa komponen yang harusnya didapat, justru dengan aturan yang baru itu dikurangi," beber pria yang juga ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Apalagi posisi para tenaga kesehatan non PNS ini tidak kalah pentingnya dengan yang berstatus PNS. Kehadiran mereka juga sangat dibutuhkan di RSUD tersebut. Fraksi PKS memandang, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup untuk menyejahterakan dan menjamin tunjangan yang layak. "Gubernur harusnya memberikan dukungan kepada mereka untuk hidup layak, sehingga masyarakat semakin bisa terlayani," tandas Abdurrahman.

Tuntutan dengan sistem BPJS, saat ini yang cukup tinggi. Sehingga perlu diimbangi dengan pemenuhan hak-hak para tenaga kesehatan non PNS. Jika terjadi pengurangan tunjangan, maka akan membuat kinerja semakin merosot. "Kalau ini terjadi, tentu berdampak pada pelayanan yang buruk. Makanya harus ditingkatkan hak-hak mereka dengan regulasi yang baik, bukan malah dikurangi," pungkas Abdurrahman. (pes)



Abdurrahman Suhaimi